



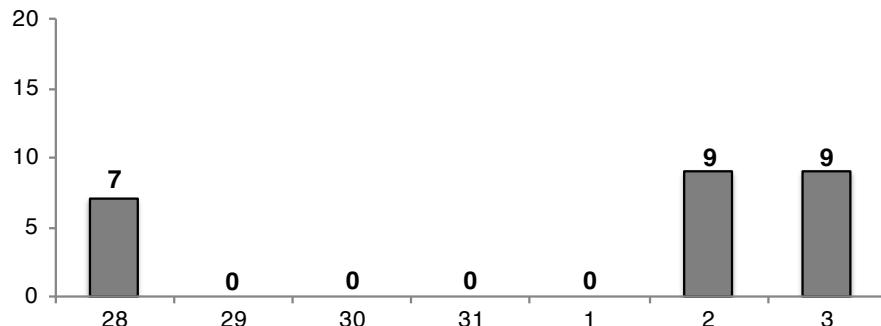
LAPORAN MEDIA CETAK

**Gubernur Jawa Tengah
(03 Juni 2025)**

Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
2	9	9	0	0

Daily Statistic



Media Share

-

Influencers

-

Table Of Contents : 03 Juni 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	03 Juni 2025	Jateng Pos	Perlu Upgrade Gaya Komunikasi	1	Positive	
2	03 Juni 2025	Jateng Pos	Keluh Kesah Ortu Cariakan Sekolah Anak pada Gubernur	12	Positive	
3	03 Juni 2025	Jateng Pos	Jateng Siapkan Satgas PHK	12	Positive	
4	03 Juni 2025	Suara Merdeka	Pemprov Jateng Dorong Sinergi Genjot UMKM	3	Positive	
5	03 Juni 2025	Suara Merdeka	Solusi Tangani Banjir Sayung	4	Positive	
6	03 Juni 2025	Suara Merdeka	Bansos Rp12,3 Triliun Siap Disalurkan ke 3,4 Juta KPM	9	Positive	
7	03 Juni 2025	Suara Merdeka	38 Program Terlaksana, 73 Dianggarkan	9	Positive	
8	03 Juni 2025	Suara Merdeka	Gubernur Pastikan Profesionalisme Petugas SPMB	10	Positive	
9	03 Juni 2025	Suara Merdeka	Sekolah Rakyat di Wonosobo Ditargetkan Juli	12	Positive	

Title	Perlu Upgrade Gaya Komunikasi		
Media	Jateng Pos	Reporter	dtc/muz
Date	2025-06-03	Tone	Positive
Page	1	PR Value	

Perlu Upgrade Gaya Komunikasi



EVALUASI KINERJA: Sesi foto bersama seusai diskusi evaluasi 100 hari Gubernur Jateng di Fisip Undip, Senin (2/6).

Evaluasi 100 Hari Luthfi-Yasin

SEMARANG - Universitas Diponegoro (Undip) melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) menggelar diskusi evaluasi 100 hari

kinerja Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Berbagai capaian dipaparkan, namun ada salah satu catatan yaitu terkait cara berkomunikasi Gubernur Jateng, Endang Tri Wahyuningish.

Wijayanto mengatakan, sebenarnya melihat 100 hari pemerintahan kepala daerah baru terlalu dini dia-

Diskusi itu dihadiri Dekan Fisip Undip sekaligus pengamat politik, Teguh Yuwono, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng.

■ BACA PERLU..HAL 11

Perlu

dikan patokan kinerja selama satu periode. Namun bisa jadi pada akhirnya kinerja lebih baik ke depannya.

"Sebagai satu masa, 100 hari terlalu singkat tapi bisa melihat bagaimana kinerja pemerintahan dan jadi blue print lima tahun ke depan," kata Wijayanto usai acara di ruang gedung A Fisip Undip, Senin (2/6).

Dari sisi akademisi, salah satu gebrakan Aham Luthfi dalam kepemimpinannya yaitu kolaborasi dengan 44 perguruan tinggi se-Jawa Tengah. Di Undip ada 30 lembaga kerja sama salah satunya dengan Universitas Pansura menggunakan alat termurah dari Undip.

"Pertama kalinya sepanjang sejarah yang saya lihat, ini melibatkan 44 universitas di Jateng. Undip berbaggahit bisa kerja sama dengan Projek Lesung. Dengan kerjasama dengan universitas lainnya, kita bisa mengatasi kelangkaan air bersih di persisir. Kita ubah air asin atau payau jadi air bisa diminum,"

elas Wijayanto.

Pekerjaan Luthfi yang paling menonjot adalah diskusi evaluasi 100 hari yang telah berlangsung di Universitas

Yayasan Pendidikan dan Pengembangan program dan kebijakan yang dijalankan.

"Saya rasa belum sudah ada catatan tentang Luthfi di luar dari kebijakan yang dikeluarkan, yaitu soal caracomunikasi publik."

"Kebijakan yang dilakukan perlu memperbaiki dan memperluas wawasan kaskus publik. Karena selain kinerja yang baik dan tepat juga perlu partisipasi publik yang luas inilah pentingnya komunikasi. Tidak sama dengan penitraan ya," ujar Wijayanto.

"Selain itu harus ada bantuan dengan slogan 'ngopeni ngelakoni' itu komunikasi 'wijawan' yang bisa masuk ke benak masyarakat. Mereka punya modal baik untuk berkomunikasi dengan gaya Jateng," katanya.

Dalam penataran, Zulkifli mengatakan bahwa hasil pemerintahan Luthfi-Yasin selama 100 hari, Antara lain perumbuhan ekonomi Jateng yang meningkatkan tren positif dibanding daerah lainnya di Jawa. Dalam datanya, ekonomi Jateng pada triwulan IV 2024 mencapai triwulan III 2023 sebesar 4,49%, 4,50% persen. Sedangkan Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan dari angka 5,03 persen

menjadi 5 persen. Kemudian Jawa Barat di 5,02 persen turun menjadi 4,99 persen.

Di Jawa memiliki hava Tengah memiliki kontribusi meningkatkan kesehatan masyarakat terbesar se-Indonesia dengan jumlah sebanyak 2.832.160 orang. Kemudian ada implementasi pendidikan, koperasi Merah Putih di Jawa memiliki kontribusi se-Indonesia dengan indikator sudah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel) sebanyak 8.041 desa/kelurahan, beserta 981 desa/kelurahan sudah beroperasi.

"Walupun pendapatan masyarakat belum signifikan naiknya, tapi bagaimana kita untuk memberikan stimulus. Misal salah satunya teman buruh. Saat ini ada koperasi buruh. Yang mana dari teman teman buruh yang ikut berkontribusi. Akhirnya pola hidup bisa membeli lebih murah. Di kawasan industri juga ada day care," jelasnya. (dtc/muz)

dari hal 1

Title	Keluh Kesah Ortu Carikan Sekolah Anak pada Gubernur		
Media	Jateng Pos	Reporter	Jan
Date	2025-06-03	Tone	Positive
Page	12	PR Value	



Gubernur Jateng Ahmad Luthfi usai meninjau SPMB.

Keluh-Kesah Ortu Carikan Sekolah Anak pada Gubernur

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau Posko Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Senin, 2 Juni 2025.

Dalam tinjauan tersebut, Luthfi melihat dan berdialog dengan petugas dan sejumlah orangtua murid yang melaporkan atau mengadukan kendala dalam pendaftaran. Di antaranya terkait alamat dan nomor induk kartu keluarga (KK) seperti yang dialami oleh Evi Dian Perwira Sari, warga Jatisari

Permai, Mijen, Kota Semarang. "Hari Rabu saya sudah masuk akun, setelah di-search itu RW tempat tinggal saya tidak sesuai dengan KK, jadi saya cari informasi ke sini siapa yang bisa memperbaiki. Punya saya yang salah cuma RW-nya, lainnya benar," ujar Evi saat ditemui di lokasi.

Setelah datang ke Posko SPMB, ia mendapatkan informasi dan langkah penyelesaian dari petugas. Dari arahan petugas ia diminta untuk datang ke sekolah atau surau pendidikan terdekat yang memiliki wewenang verifikasi data.

"Tim verifikasi di sekolah ter-

dekat dari alamat saya yang bisa menghubungkan. Kalau dari penjelasan petugas tadi kesalahan bisa operator sekolah atau anak saat mengisi data pertama kali. Banyak yang seperti itu," ujarnya setelah mendapatkan penjelasan petugas Posko SPMB.

Beda dengan Teti Rahmawati warga Perumahan Genuk Indah, Kota Semarang. Ia kesulitan mendaftarkan anaknya karena yang bersangkutan sempat tidak sekolah datang ke sekolah atau surau pendidikan terdekat yang memiliki

wewenang verifikasi data. "Kebetulan anak saya ini harusnya masuk SMA tahun 2024 kemarin tetapi karena sakit jadi baru daftar tahun 2025 ini. Tadi pada saat mendaftar itu nomor NISN tidak muncul, saat diklik selalu muncul tidak terdaftar," ujarnya.

Penjelasan dari petugas Posko SPMB, putri Teti yang berusia 16 masuk dalam kategori anak tidak sekolah (ATS). Kemudian Teti juga diberi tahu bagaimana cara dan langkah pendaftaran bagi ATS.

"Sudah clear tadi. Dulu waktu

daftarkan anak saya yang pertama juga di sini dilayani langsung selesai, langsung bisa. Sudah dikasih langkah untuk mendaftarkan terkait ATS itu," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan dari tinjauannya di Posko SPMB Disdikbud memang ditemukan adanya beberapa kendala dalam SPMB SMAN/SMKN seperti alamat rumah, nomor registrasi kartu keluarga dan lainnya. Oleh petugas sudah dilayani dengan baik.

"Di Jawa Tengah memang saya wanti-wanti tentang profesionalisme. Tugasnya harus melayani dengan cara tersenyum, ramah," katanya usai tinjauan.

Ia juga menegaskan bahwa hal paling pokok terkait SPMB SMA/SMK/ SLB di Jawa Tengah tidak mengenal istilah titip-titip dengan tagline "No Titip-titip, No Jasip". Ia menekankan pendaftaran harus sesuai dengan kemampuan anak didik, orangtua murid tidak boleh memaksakan kehendak.

"Gak oleh titip-titip, tidak boleh terima jasa titipan, semuanya normatif apa adanya sehingga anak didik kita yang akan datang di Jawa Tengah akan menjadi anak didik yang betul-betul profesional. Kalau perlu kantong (petugas) ini ditutupi," ujar Luthfi. (*jan)

Title	Jateng Siapkan Satgas PHK		
Media	Jateng Pos	Reporter	jan
Date	2025-06-03	Tone	Positive
Page	12	PR Value	

Jateng Siapkan Satgas PHK

Antisipasi Ancaman PHK Buruh Besar-Besaran

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK di wilayahnya.

"Satgas PHK itu perintah presiden. Itu harus segera ditangkap dengan baik di wilayah kita. Segera dibentuk dan rumuskannya apa yang harus dilakukan," kata Luthfi saat memimpin rapat koordinasi terkait ketenagakerjaan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, 2 Juni 2025.

Luthfi mengatakan, Satgas PHK ini dibentuk untuk mereduksi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sekaligus mengambil langkah pencegahan PHK karyawan tanpa pembenaran kewajiban. Satgas ini mulai ber-



Satgas PHK itu perintah presiden. Itu harus segera ditangkap dengan baik di wilayah kita. Segera dibentuk dan rumuskannya apa yang harus dilakukan

AHMAD LUTHFI
(Gubernur Jateng)

tindak ketika suatu perusahaan masuk dalam kategori kuning.

"Jadi Satgas PHK itu kita gunakan tidak pada saat perusahaan itu sudah palit (merah) tetapi dari upaya pencegahan pun sudah kita terapkan sehingga secara tidak langsung mencegah terjadinya PHK di perusahaan-perusahaan," katanya.

Satgas PHK tersebut berisi dari beberapa kompartemen. Terdiri atas dinas tenaga kerja, serikat pekerja dan serikat buruh yang ada di perusahaan, dan pihak pengusaha.

Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Ahmad Aziz menambahkan, Satgas PHK ini bagian dari

diteksi dini untuk memerlukan perusahaan-perusahaan yang dalam kategori sudah kuning. Selama ini sudah ada segmentasi perusahaan, di antaranya kategori hijau atau mantap yaitu yang melaksanakan aturan-aturan norma ketenagakerjaan. Selanjutnya ada perusahaan yang kuning dan merah.

"Kuning itu biasanya ada permasalahan-permasalahan. Misalnya lembur tidak dibayar, hak-hak (karyawan) ada yang dikurangi. Itu harus kita dalami persoalannya seperti apa. Kalau persoalan itu berlanjut,ujungnya bisa menjadi merah atau terjadi PHK," jelasnya.

Saat memberikan paparan, Ahmad Luthfi sempat menyenggung terkait keterlibatan kurator. Dalam hal ini, Aziz menjelaskan bahwa kurator masih kalau sebuah perusahaan sudah palit. Tanggung jawab manajemen atau pemilik beralih kepada kurator.



Gubernur Jateng Ahmad Luthfi memimpin rapat koordinasi ketenagakerjaan.

kerja berupa jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pesangon diterima oleh pekerja atau karyawan.

"Termasuk hak-hak lain yang belum dibayarkan seperti penggantian cuti, penggantian lembur. Kita memastikan untuk itu diterima oleh yang bersangkutan," katanya. (*/jan)

Title	Pemprov Jateng Dorong Sinergi Genjot UMKM		
Media	Suara Merdeka	Reporter	H23-37
Date	2025-06-03	Tone	Positive
Page	3	PR Value	



FOTO BERSAMA: Komisaris Utama & PSP Bank Arto Moro Prof Subyakto (tengah) bersama jajaran bertemu dengan Gubernur Jateng Drs Ahmad Lutfi, untuk membahas isu perekonomian, Senin (2/6). (37).

Pemprov Jateng Dorong Sinergi Genjot UMKM

SEMARANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada April 2025 mengalami pertumbuhan, meski sedikit melambat. Total penyaluran kredit mencapai Rp7.960 triliun, tumbuh 8,88 persen secara tahunan (yo), lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2025 sebesar 9,16 persen.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi menjadi penggerak utama dengan lonjakan 15,86 persen, disusul kredit konsumsi yang naik 8,97 persen, dan kredit modal kerja yang tumbuh 1 pada angka 4,62 persen. Dari sisi debitur kredit korporasi mencatat pertumbuhan sebesar 12,77 persen, sementara kredit untuk UMKM naik sebesar 2,60 persen.

Berbagai stimulus pun telah digulirkan Pemprov Jateng untuk menggenjot daya tahan UMKM, mulai dari bantuan sosial, insentif pajak, hingga kebijakan pendukung lainnya.

Jajaran Komisaris dan Direksi Bank Arto Moro menggelar diskusi strategis dengan Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs Ahmad Lutfi SH SSt MK, Senin (2/6). Pertemuan di Kantor Gubernur Jl Pahlawan, Kota Semarang,

fokus membahas percepatan pertumbuhan UMKM.

Langkah tersebut menjadi sinyal kuat kolaborasi antara perbankan dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk membangkitkan ekonomi lokal yang stagnan dan berkelanjutan.

Bank Arto Moro, yang telah lama dikenal sebagai pelopor pemberdayaan UMKM di Jawa Tengah, memperluaskan komitmennya melalui berbagai inisiatif. Sebelumnya, rombongan bank ini menyambangi sentra-sentra kreatif di Kudus dan berdialog dengan Bupati Kudus untuk memperkuat ekosistem UMKM.

Komisaris Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali Bank Arto Moro Prof Dr H Subyakto SH MH MM menebakkan peran krusial perbankan lokal dalam mendukung UMKM.

Pertumbuhan UMKM

"Dukungan komprehensif, mulai dari pembiayaan hingga pelatihan, adalah kunci untuk mempercepat pertumbuhan UMKM dan memperkuat kontribusinya bagi perekonomian nasional," ujarnya.

Sebagai bankir berpengalaman, Subyakto menekankan bahwa Bank

Arto Moro konsisten mendampingi UMKM, tak hanya melalui kredit, tetapi juga pembinaan agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan.

"Kami telah menyalurkan kredit hingga Rp1 triliun untuk UMKM, khususnya di Kota Semarang. Banyak pelaku usaha yang sebelumnya kesulitan mengakses bantuan kini telah berhasil dan bina hingga mampu tumbuh optimal," tuturnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, ambisi besar Pemprov Jateng untuk mengerak pertumbuhan ekonomi daerah hingga 4,5 persen. Dalam diskusi tersebut, Lutfi menekankan bahwa kunci keberhasilan terletak pada sinergi erat antara pemerintah daerah dan perbankan swasta, khususnya Bank Arto Moro, untuk mengokohkan UMKM sebagai bank rural besar Jawa Tengah.

Menurut Lutfi, kehadiran bank swasta yang progresif dan peka terhadap kebutuhan pelaku usaha mikro menjadi katalis penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.

"UMKM butuh sentuhan nyata dari

perbankan swasta. Namun, tanpa dukungan pemerintah, bank swasta akan sulit bergerak maju. Di sinilah peran strategis pemerintah untuk memastikan UMKM terus berkembang," katanya.

Gubernur tak ragu memuji komitmen Bank Arto Moro yang telah mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM dengan proses cepat, terjangkau, dan berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan.

"Tantangan UMKM yang kuat, target pertumbuhan ekonomi hanyalah angan. Ketika UMKM tumbuh, ekonomi daerah ikut melesat. Bank Arto Moro dengan pengalaman dan jangkauannya yang luas dalam masyarakat, memiliki potensi besar menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan," kata Lutfi.

Dengan semangat tersebut, Gubernur Ahmad Lutfi berharap silaturahmi dan kolaborasi ini dapat menjadi titik awal kedua pihak untuk bersama membangun dan meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah, serta bertumbuh bersama di berbagai sektor, salah satunya yakni dengan implementasi UMKM. (H23-37)

Title	Solusi Tangani Banjir Sayung		
Media	Suara Merdeka	Reporter	
Date	2025-06-03	Tone	Positive
Page	4	PR Value	

Solusi Tangani Bencana Rob Sayung

Banjir rob yang melanda Kecamatan Sayung, Demak, selama 6-7 bulan terakhir telah menimbulkan dampak multidimensi bagi warga. Kunjungan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin ke lokasi pada akhir Mei 2025 mengungkap kompleksitas masalah warga. Aktivitas warga praktis lumpuh. Kerusakan infrastruktur terutama jalan, dinding penahan tanah, dan rumah-rumah warga makin hari terus bertambah. Hal itu berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat.

Hampir 80 persen jalan di Desa Sriwulan rusak, dan lebih dari 150 rumah ambles tergerus erosi. Warga harus menggunakan rakit dari berbagai peralatan bekas untuk mobilitas mereka. Kendaraan bermotor parkir di tepi jalan utama yang masih belum terjamah rob. Bila tak segera dilakukan upaya serius, bukan tidak mungkin akan menimbulkan kerawanan sosial. Pencurian kendaraan bermotor sangat rawan, dan ini akan memicu konflik sosial warga.

Penanganan rob di Sayung ini memerlukan kebijakan strategis jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek, warga terdampak memerlukan kelancaran untuk memenuhi kebutuhan primer. Bantuan memang terus mengalir dari berbagai instansi pemerintah, swasta, dan lembaga sosial kemanusiaan. Namun, warga harus mendapatjaminan memperoleh akses tanpa mengandalkan bantuan. Jalur menuju ke pasar, sekolah, maupun tempat bekerja perlu diprioritaskan.

Pada prinsipnya, aktivitas warga tak mandek dalam situasi rob. Kegiatan ekonomi dan pendidikan harus terus berjalan, meski dalam kondisi darurat. Ketika dua aktivitas itu berhenti total, peran pemerintah menjadi sorotan tajam. Pemerintah Demak, Pemprov Jateng, dan Pusat diharapkan turun tangan lebih cepat tanpa menunggu warga korban rob makin menderita. Warga terdampak memerlukan solusi cepat agar segera keluar dari persoalan krusial ini.

Pembangunan *giant sea wall* atau tanggul raksasa dan kolam retensi terus berjalan. Menarik statemen Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bahwa kolam retensi akan segera dibuka secara fungsional. Belum secara resmi operasional, namun selama fungsional diharapkan bisa mengatasi rob Sayung. Pernyataan tersebut memberikan kelegaan. Ditambah penyiapan pompa berkapasitas tinggi untuk menyedot air keluar dari permukiman terdampak.

Penanganan jangka panjang perlu disusun bersama tim teknis. Rekomendasi untuk mengembangkan konsep futuristik seperti rumah apung modifikasi sangat menarik. Rumah panggung dengan biaya Rp 200 juta sebagai prototipe bisa dilihat oleh warga dan diuji. Pemanfaatan teknologi dengan konstruksi tertentu yang nyaman direkomendasikan sebagai material. Untuk itu, solusi rob Sayung memerlukan sinergi seluruh pihak dan konsistensi menjaga tata kelola kawasan pesisir.

Title	Bansos Rp12,3 Triliun Siap Disalurkan ke 3,4 Juta KPM		
Media	Suara Merdeka	Reporter	Lan-23
Date	2025-06-03	Tone	Positive
Page	9	PR Value	

Bansos Rp12,3 Triliun Siap Disalurkan ke 3,4 Juta KPM

WONOSOBO - Sebanyak 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah akan menerima bantuan sosial (bansos) pada 2025. Total anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat mencapai Rp12,396 triliun. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026 dan kemiskinan umum di bawah lima persen pada 2029.

Menteri Sosial Syaifulah Yusuf menegaskan pentingnya kesamaan data dan koordinasi lintas lembaga untuk menjamin efektivitas program bansos tersebut. "Harapannya seperti arahan Presiden, kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan tahun 2029 kemiskinan di bawah 5 persen," ujar Mensos saat pertemuan dengan pilar-pilar kesejahteraan sosial di Wonosobo, Minggu (1/6). Menurutnya, semua langkah harus dimulai dengan sinkronisasi data, dilanjutkan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi, agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Pilar-pilar kesejahteraan sosial yang terlibat meliputi 4.986 pendamping PKH, 543 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 5.333 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), 1.064 TAGANA, 28 Pelopor Perdamaian, dan 111 Pendamping Rehabilitasi Sosial.

Kolaborasi Data

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggarisbawahi pentingnya kolaborasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dinilai krusial untuk melakukan intervensi yang tepat sasaran dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem. "Kolaborasi dengan pemerintah pusat terkait data itu sangat penting, sehingga intervensi pembangunan di wilayah kita, khususnya kemiskinan ekstrem bisa dilakukan bersama-sama," kata Luthfi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per September 2024, angka kemiskinan di Jateng tercatat 9,58%, dengan kemiskinan ekstrem 0,89%. Untuk menangani permasalahan tersebut, Pemprov Jateng menerapkan tiga strategi utama: pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, peningkatan pendapatan keluarga miskin, dan pengurangan wilayah kantong kemiskinan.

Salah satu implementasi nyata adalah program "Satu OPD Satu Desa Dampingan" yang menyasar 1.287 desa prioritas di 35 kabupaten/kota. Desa dengan tingkat penerima bansos di atas 60 persen menjadi fokus intervensi dinas-dinas provinsi. "Desa miskin ini kita intensif langsung. Dinas kita akan turun bila bansosnya di atas 60 persen," jelas Gubernur.

Pemprov Jateng juga memberikan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 17.000 unit dan menyediakan beasiswa bagi sekitar 5.000 anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem melalui kerja sama dengan SMA dan SMK swasta. "Data bantuan perbaikan rumah sudah terintegrasi dengan Kemensos, termasuk dukungan sarana pendidikan sesuai program pemerintah pusat," jelasnya.(lan-23)



SM/dok

PERTEMUAN PILAR: Menteri Sosial Syaifulah Yusuf dan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menghadiri pertemuan pilar kesejahteraan sosial di Pendopo Kabupaten Wonosobo.(23)

Title	38 Program Terlaksana, 73 Dianggarkan		
Media	Suara Merdeka	Reporter	Ekd-23
Date	2025-06-03	Tone	Positive
Page	9	PR Value	



DOA BERSAMA: Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dalam "Jawa Tengah Bersholawat dan Doa Bersama" menghadirkan Habib Ali Zainal Assegaf dan KH Muhammad Abdurrahman Al Kautsar (Gus Kautsar). (23)

38 Program Terlaksana, 73 Dianggarkan

■ Doa Bersama 100 Hari Luthfi- Taj Yasin

SEMARANG - Selama 100 hari terakhir, atau semenjak Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dilantik pada 20 Februari 2025, Jateng berubah menjadi lebih baik. Berbagai kebijakan dikeksusi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sejumblah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur bahkan menjadi yang terbaik di antara provinsi lain di Indonesia. Gaya kepemimpinan yang kental dengan akhlak dan integritas, serta memperbaiki kinerja pemerintahan di berbagai sektor.

Total ada 136 program dan sebanyak 38 atau 28 % program di antaranya telah terlaksana. Selanjutnya 73 atau 54 % program telah teranggaran dan 25 atau 18 % sisanya segera dikebut. "Turun ke masyarakat, mengetahui akar permasalahan dan segera cekcok," kata Ahmad Lutfi yang menyukai kerja tipe ini.

Dalam 100 hari kerja Gubernur Ahmad Lutfi dan Wagub Taj Yasin

Maimoon, ada 10 kebijakan yang benar-benar terasa dampak positifnya. Pertama, mengembalikan status internasional Bandara Ahmad Yani Kota Semarang dan Bandara Adi Soemarmo Solo. Kedua, pelayanan kesehatan yang mendekatkan dirinya kepada masyarakat yakni kesejahteraan rakyat Jawa Tengah.

Jateng menjadi primadona Ketiga, Jateng menjadi primadona pertama di Indonesia yang memberikan "sekolah gratis" di SMA dan SMK Swasta.

Total ada 139 SMA dan SMK swasta terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK.

Doa Bersama

Kempar, adalah program desilasi yang menciptakan air payau menjernihkan air tawar. Kehadiran Program Pesantren Obah telah diperkuat dengan menyasar peningkatan kualitas.

Kecamatan, Penerusan Tarif Angkutan

yalah mewujudkan masyarakat mendukung program-program terbaik. Baik untuk hal-hal bersifat materi maupun rohani, melalui kesinjiran dan kecerdasan rohani.

"Penting untuk menjadi pemimpin yang mendengarkan. Gubernur Ahmad Lutfi ini sosok yang mau mendengarkan", katanya saat ceramah di acara.

Dalam kesempatan itu, Lutfi menuturkan, Pancasila yang lahir 1 Juni terdapat nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Nilai-nilai itu menjadi napasnya dalam membangun Jawa Tengah.

"Seratus hari ini adalah evaluasi, memang ada yang kurang maksimal, tapi akhirnya kita maksimalkan kembali.

Prihatinya, dalam membangun Jawa Tengah tidak boleh adanya sektor, harus bersama-sama,"

kata dia. Terkait acara Jateng Bersholawat yang dibadiri ribuan warga, Lutfi berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. "Ke depan kita harus lakukan lagi, sehingga peningkatan pelayanan masyarakat, keterbukaan informasi publik, dan pembangunan harus kita genjot lagi. Sehingga 100 hari mendatang evaluasi untuk ditingkatkan di hari-hari berikutnya," katanya. (ekd-23)

Title	Gubernur Pastikan Profesionalisme Petugas SPMB		
Media	Suara Merdeka	Reporter	ekd-26
Date	2025-06-03	Tone	Positive
Page	10	PR Value	



Gubernur Pastikan Profesionalisme Petugas SPMB

SEMARANG - Gubernur Ahmad Luthfi meninjau Posko Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Senin, (2/6).

Dalam tinjauan tersebut, Luthfi berdialog dengan petugas dan sejumlah orangtua murid yang mengadukan kendala dalam pendaftaran. Salah satunya, Evi Dian Perwira Sari, warga Jatisari Permai, Mijen, Kota Semarang yang mengadu soal

saya yang salah cuma RW-nya, lainnya benar," ujar Evi.

Setelah datang ke Posko SPMB, ia mendapatkan informasi dan langkah penyelesaian dari petugas. Dari arahan petugas ia diminta untuk datang ke sekolah atau satuan pendidikan terdekat yang memiliki wewenang verifikasi data.

Warga Perumahan Genuk Indah, Kota Semarang, Teti Rahmawati mengaku, mengalami kendala mendaftarkan anaknya karena yang bersangkutan sempat tidak sekolah selama satu tahun sejak lulus SMP tahun 2024. Teti kemudian mendatangi Posko

SPMB untuk mencari informasi. "Tadi pada saat mendaftar itu nomor NISN tidak muncul, saat diklik selalu muncul tidak terdaftar," ujarnya.

Penjelasan dari petugas Posko SPMB, putri Teti yang berusia 16 masuk dalam kategori anak tidak sekolah (ATS). Kemudian Teti juga diberi tahu bagaimana cara dan langkah pendaftaran bagi ATS. "Sudah clear tadi. Dulu waktunya daftarkan anak saya yang pertama juga di sini dilayani langsung selesai, langsung bisa. Sudah dikasih langkah untuk mendaftarkan terkait ATS itu," katanya.(ekd-26)

Title	Sekolah Rakyat di Wonosobo Ditargetkan Juli		
Media	Suara Merdeka	Reporter	Ian-36
Date	2025-06-03	Tone	Positive
Page	12	PR Value	

Sekolah Rakyat di Wonosobo Ditarget Juli

WONOSOBO - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Wonosobo, Minggu (1/6). Kunjungan difokuskan meninjau kesiapan Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas nasional menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan rawan putus sekolah.

Dalam kunjungan itu, Gus Ipul didampingi Bupati Afif Nurhidayat, dan jajaran pemerintah daerah. Ia menyempatkan diri berdialog dengan calon peserta didik dan para orang tua untuk menyerap langsung harapan serta kebutuhan masyarakat terkait program pendidikan alternatif ini.

"Saat ini sekolah memang gratis, tapi

tetapi ada biaya-biaya lain yang memberatkan. Inilah menyebabkan banyak anak dari keluarga tidak mampu akhirnya tidak melanjutkan sekolah," ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan Sekolah Rakyat merupakan mandat langsung Presiden Prabowo sebagai bagian strategi jangka panjang menurunkan angka kemiskinan melalui jalur pendidikan. Di Wonosobo, Sekolah Rakyat akan memanfaatkan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) selama satu tahun. Fasilitas ini diperlukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan hanya membutuhkan sedikit renovasi.

Program ini ditargetkan mulai operasional pada Juli 2025. Secara nasional, pemerintah menargetkan pendirian 200 unit Sekolah Rakyat sepanjang tahun ini, masing-masing 100 unit dari APBN dan 100 unit hasil kolaborasi dengan sektor swasta. Dari jumlah itu, lebih dari 10.000 anak terdata sebagai calon siswa.

Tahap Kontrak

Gubernur Jateng Ahmad Lutfi yang turut hadir dalam kunjungan itu, menyampaikan beberapa titik SR di provinsi ini sudah masuk tahap kontrak,

termasuk di Temanggung, Solo, Magelang, Pati, dan Banyumas. "Penyiapan sarana sudah dilakukan. Verifikasi di tiap kabupaten sudah jalan," ujarnya.

Untuk wilayah Jawa Tengah, Pemprov juga menjalankan program kemitraan dengan 139 SMA/SMK swasta guna memperluas akses pendidikan gratis bagi siswa miskin, di samping program SMK Jateng yang berjalan sebelumnya.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengakui sebaran wilayah yang luas masih menjadi tantangan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Namun ia menegaskan upaya penanggulangan kemiskinan terus menunjukkan hasil. "Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 17,36% di 2022 menjadi 15,28% di 2025," ungkap Afif.

Ia menambahkan, Pemkab Wonosobo menargetkan pendirian Sekolah Rakyat jenjang SMA yang mampu menampung total 100 siswa. "Rintisan awal menampung 25 siswa per kelas, lokasi berada di kompleks BLK Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi," katanya.(ian-36)



SM/Alan Agung

TINJAU LOKASI: Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf meninjau calon lokasi Sekolah Rakyat di Wonosobo, Minggu (1/6) untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana sebelum program dimulai.(36)